

## ABSTRAK

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu komponen Dana Perimbangan yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah guna menunjang kegiatan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai mekanisme penyaluran DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, perhitungan DAU yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung, serta pengelolaan dan penggunaan DAU oleh Pemkot Bandung. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan sumber data adalah data primer dan sekunder. Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan kassubag Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Bandung, sedangkan data skunder berasal dari APBD Kota Bandung dan Badan Pusat Statistik Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi DAU yang diterima oleh Pemkot Bandung setiap tahun anggaran pada kenyataannya selalu lebih kecil dari formulasi dan besaran DAU yang diusulkan oleh Pemkot Bandung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan DAU oleh Pemkot Bandung lebih banyak dipergunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja pembangunan, hal ini mau tidak mau memaksa Pemkot Bandung untuk menaikkan penerimaan yang lain agar tidak terlalu bergantung pada DAU yang besaran alokasi untuk daerahnya dipengaruhi oleh dinamika finansial Negara.

Kata kunci : DAU, Dana Alokasi Umum, Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan

## **ABSTRACT**

*The General Allocation Fund or Blok Grant is one component of the Balancing fund that The Central Government transfers to the Regional Government to support decentralization activities as stated in constitution no.33 year 2004 concerning balanced fund between the Central Government and Local Government . This Study Aims to Provide an overview of Mechanism of DAU distribution from the Central Government to Local Government. The calculation of DAU received by The Bandung City Government and the management by Bandung City Government. This study uses qualitative descriptive analysis with data sources are primary and secondary data. Primary data was obtained by interview with the Head of Budgeting Section of Bandung City Government Financial and Asset Agency while secondary data came from the APBD of Bandung. The result shows that the DAU Allocation received by Bandung Government every fiscal year is in fact always less than the formulation of amount the government proposed. Research also shows that use of DAU by Bandung City Government is more widely used for personnel expenditure compared to development spending. This inevitability forces the Bandung City Government to raise other revenue so that it does not depend too much on the DAU whose allocation amount for the region is influenced by national financial condition.*

*Keywords : Block Grants, DAU, Fiscal Decentralization*

